



Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Kab. Kep. Selayar



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2025

Jl. K.H. Dewantara No. 18

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Semoga Laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670526 199703 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Sistem manajemen pemerintahan sudah harus berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dalam peningkatan akuntabilitas, setiap rencana kinerja didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat, dan mampu merespon setiap isu permasalahan strategis yang muncul, serta anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 telah ditetapkan 9 (Sembilan) program, 9 (Sembilan) Kegiatan Penunjang, 8 (Delapan) Kegiatan Bidang Perdagangan dan 5 (Lima) Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM yang diwujudkan melalui penetapan kinerja yang dilaksanakan dan harus dicapai dalam tahun 2024 oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dari hasil laporan pencapaian sasaran strategis tersebut menunjukkan pencapaian target kegiatan di akhir tahun 2024 dengan realisasi sebesar 98,66 %.

Pengukuran kinerja organisasi dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan dan Pengembangan UMKM yang berkualitas dengan pemberian bantuan peralatan, pelatihan, sosialisasi dan workshop kepada para pelaku usaha agar mampu mengembangkan hasil produksinya dan pendapatan para pelaku juga meningkat, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar dengan melaksanakan pemantauan fasilitas perdagangan yang telah ada dan mengidentifikasi fasilitas perdagangan yang belum memenuhi standar.



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 | 20 |
| Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 | 25 |
| Tabel Rencana Kinerja Tahun 2024 | 26 |
| Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 42 |
| Pengukuran Kinerja Tahun 2024 | 45 |
| Tabel Target dan Realisasi Kinerja | 46 |
| Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja Capaian Tahun ini dengan Tahun lalu ... | 47 |
| Tabel Jumlah Koperasi dan BPR tahun 2019-2024 | 51 |
| Tabel Pengadaan Peralatan | 52 |
| Tabel Realisasi Keuangan Tahun 2024 | 57 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| SAMPUL (HALAMAN JUDUL) | |
| KATA PENGANTAR | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB. I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Gambar Umum Organisasi Perangkat Daerah..... | 2 |
| D. Isu-Isu Strategis | 13 |
| BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 18 |
| B. Indikator Kinerja Utama..... | 24 |
| C. Rencana Kerja Tahunan..... | 26 |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 41 |
| BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Pengukuran Kinerja | 45 |
| B. Analisis Capaian Kinerja | 45 |
| C. Realisasi Keuangan..... | 57 |
| BAB. IV PENUTUP | 67 |
| LAMPIRAN | |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... | 68 |

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya memandirikan Pemerintahan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta mengacu pada Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

B. MAKSU DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.



Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati Kepulauan Selayar dalam merumuskan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dari kelemahan – kelemahan diatas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengimbangi dengan kelebihan atau kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Profesionalisme pegawai;

3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 62 (Enam Puluh Dua) orang Pegawai, terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, 35 (Tiga Puluh Lima) orang Pegawai Harian Lepas, Untuk lebih jelas ada pada data terlampir.



4 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

| No | Dinas/Bidang/Seksi | Golongan | | | Jumlah |
|----|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | IV | III | II | |
| 1 | Kepala Dinas | 1 Org | - | - | 1 Org |
| 2 | Sekretariat | 1 Org | 5 Org | 1 Org | 7 Org |
| 3 | Perdagangan | 2 Org | 7 Org | 1 Org | 10 Org |
| 4 | Koperasi dan UKM | 1 Org | 3 Org | - | 4 Org |
| 5 | UPT Pengelolaan Pasar | - | 2 Org | - | 2 Org |
| | Total | 5 Org | 17 Org | 2 Org | 24 Org |

4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO. | Pendidikan | PNS | PHL | Jumlah |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | S2 | 8 Org | - | 8 Org |
| 2 | S1 | 13 Org | 20 Org | 33 Org |
| 3 | D.III | 1 Org | - | 1 Org |
| 4 | D.II | - | - | - |
| 5 | SMA | 5 Org | 12 Org | 17 Org |
| 6 | SD | - | 3 Org | 3 Org |
| | Total | 27 Org | 35 Org | 62 Org |

4 Data Pegawai Berdasarkan Diklat / Penjenjangan

| No | Dinas/Bidang/Seksi | Diklat / Penjenjangan | | | Jumlah |
|----|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | II | III | IV | |
| 1 | Kepala Dinas | 1 Org | - | - | 1 Orang |
| 2 | Sekretariat | - | 1 Orang | 2 Orang | 3 Orang |
| 3 | Perdagangan | - | - | 7 Orang | 7 Orang |
| 4 | Koperasi dan UKM | - | 1 Orang | 1 Orang | 2 Orang |
| | Total | 1 Orang | 2 Orang | 10 Orang | 13 Orang |

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sarana dan prasarana berdasarkan data per bulan Desember 2024 sebagaimana berikut :

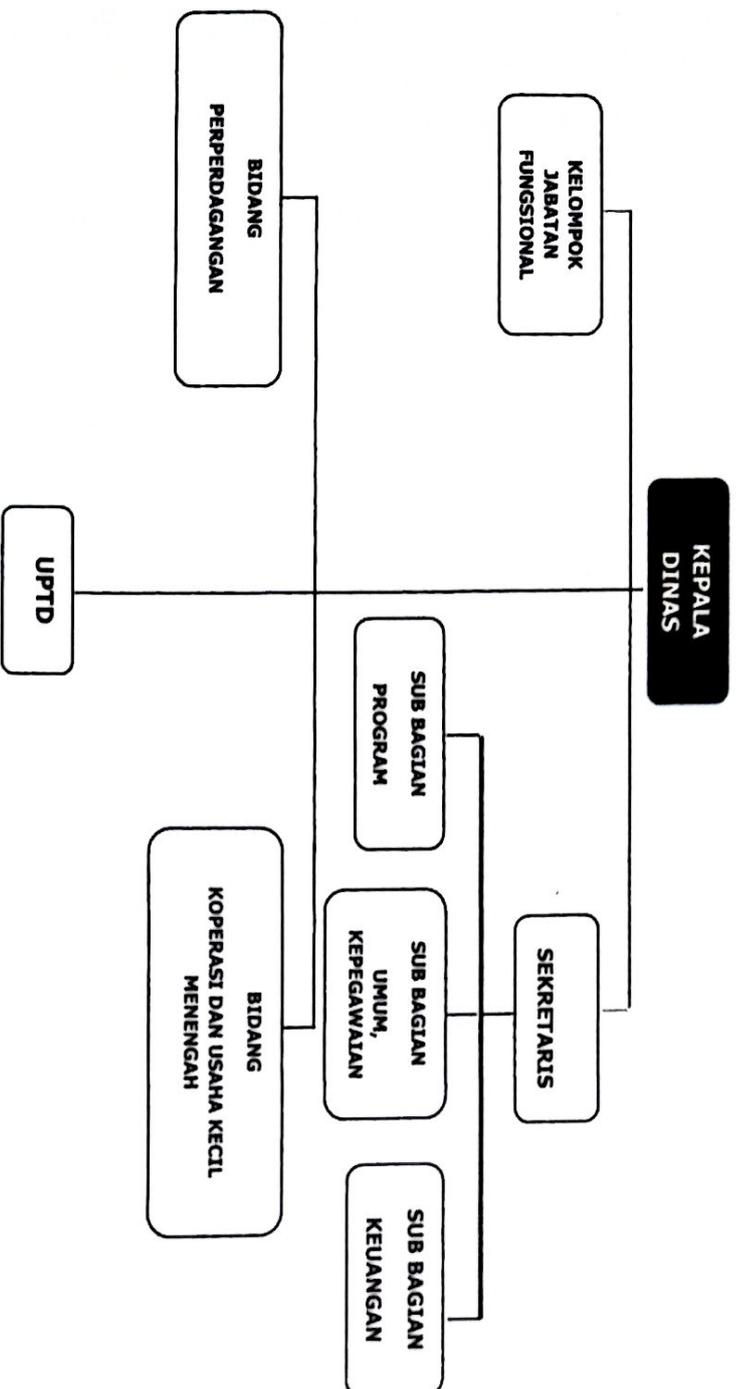
| NO. | NAMA BARANG | Jumah | Satuan | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|-------|--------|------------|
| 1 | Komputer | 15 | Unit | Baik |
| 2 | Laptop | 42 | Unit | Baik |
| 3 | Notebook | 8 | Unit | Baik |
| 4 | Printer | 16 | Unit | Baik |
| 5 | Scanner | 1 | Unit | Baik |
| 6 | Sepeda Motor | 24 | Unit | Baik |
| 7 | Mesin Las Listrik | 1 | Unit | Baik |
| 8 | Mesin Pompa Air | 3 | Unit | Baik |
| 9 | Termometer | 1 | Unit | Baik |
| 10 | Stopwastch | 1 | Unit | Baik |
| 11 | Tool Set | 2 | Unit | Baik |
| 12 | Landasan Cap Lengkap | 2 | Unit | Baik |
| 13 | Tang Plombir | 4 | Unit | Baik |
| 14 | Bejana Ukur | 4 | Unit | Baik |
| 15 | Timbangan Meja Kapasitas 10 KG | 6 | Unit | Baik |
| 16 | Anak Timbangan Miligram | 3 | Unit | Baik |
| 17 | Anak Timbangan Bidur | 25 | Unit | Baik |
| 18 | Lemari Besi | 7 | Unit | Baik |
| 19 | Lemari Kayu | 2 | Unit | Baik |



| | | | | |
|----|---|-----|------|------|
| 20 | Rak Kayu | 1 | Unit | Baik |
| 21 | Filling Cabinet Besi | 2 | Unit | Baik |
| 22 | Lemari Kaca | 5 | Unit | Baik |
| 23 | Meja Kerja Kayu | 31 | Unit | Baik |
| 24 | Kursi Besi | 2 | Unit | Baik |
| 25 | Kursi Rapat | 120 | Unit | Baik |
| 26 | Kursi Tamu | 3 | Unit | Baik |
| 27 | Kursi Putar | 26 | Unit | Baik |
| 28 | Mesin Pemotong Rumput | 1 | Unit | Baik |
| 29 | Lemari Es | 2 | Unit | Baik |
| 30 | AC | 18 | Unit | Baik |
| 31 | TV | 7 | Unit | Baik |
| 32 | Loudspeaker | 1 | Unit | Baik |
| 33 | Soundsystem | 1 | Unit | Baik |
| 34 | Gordyin | 3 | Unit | Baik |
| 35 | Buffet Kayu | 2 | Unit | Baik |
| 36 | Buffet Kaca | 6 | Unit | Baik |
| 37 | Lemari Arsip | 3 | Unit | Baik |
| 38 | Proyektor | 5 | Unit | Baik |
| 39 | Kamera Digital | 6 | Unit | Baik |
| 40 | Faxmile | 1 | Unit | Baik |
| 41 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya | 2 | Unit | Baik |
| 42 | Kursi Kerja Pejabat Lainnya | 2 | Unit | Baik |
| 43 | Meja Kerja Pejabat Lain | 9 | Unit | Baik |



Gambar 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI



4. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LAKIP adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
2. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Sistematika Penulisan

LAKIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :



BAB. I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang
- F. Maksud dan Tujuan
- G. Gambar Umum Organisasi Perangkat Daerah
- H. Isu-Isu Strategis

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- E. Rencana Strategis
- F. Indikator Kinerja Utama
- G. Rencana Kerja Tahunan
- H. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

- D. Pengukuran Kinerja
- E. Analisis Capaian Kinerja
- F. Realisasi Keuangan

BAB. IV. PENUTUP

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

6. Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di kategorikan pada 6 (enam) peran yang saling terkait, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;



2. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan dan Koperasi, usaha kecil dan menengah
3. Pembinaan secara kontinyu guna pengembangan UKM, pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan di kabupaten;
4. Pembinaan dan pengoordinasian perlindungan konsumen dan pengawasan barang-barang beredar serta pengkoordinasian dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
5. Pembinaan, koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, aparatur pembina serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.
6. Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan aparatur pembina serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.



7. Inovasi

| | URAIAN INOVASI | MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI | HASIL/ MANFAAT | KET. |
|---|----------------|---------------------------|----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | |

Sampai saat ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar berbagai pelatihan bagi wirausaha pemula di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pelatihan lebih difokuskan pada bidang *digital marketing*, desain produk, dan penciptaan produk yang *market oriented*.

Dengan melihat berkembang pesatnya pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga harus diikuti dengan peningkatan ekonomi masyarakat lokal dengan melahirkan para wirausahawan yang kreatif dan inovatif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga mendorong pelaku usaha membentuk sebuah wadah koperasi yang mengatasi kebutuhan anggotanya. Salah satu inovasi yang digagas adalah membentuk koperasi model di setiap kecamatan sebagai model koperasi sehat yang menjadi rujukan pengelolaan koperasi lainnya.

Adapun beberapa pelatihan yang diberikan diantaranya pelatihan Publik Speaking dan komunikasi Bisnis (30 Orang), Manajemen keuangan dan pengembangan usaha skala rumah tangga bagi pelaku UMKM (30 Orang), Perkenalan Aplikasi Keuangan Digital (Si APIK) (30 orang), Strategi Branding dan Digital Marketing (30 Orang), Pengembangan Usaha Mikro (Pelatihan pembuatan Roti) (40 Orang) dengan total peserta 160 Peserta UMKM se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas UMKM, dengan mendatangkan para ahli sebagai instruktur. Dalam pelaksanaannya, peserta bisa langsung praktek dengan didampingi instruktur. Sehingga, para peserta dapat



langsung melakukannya setelah selesai kegiatan, para pelaku wirausaha harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk memacu produktifitas dan meningkatkan efisiensi usaha. Selain itu, Pelaku usaha juga harus jeli dalam melihat dan menangkap peluang usaha yang muncul seiring berkembangnya teknologi informasi para wirausaha jangan cepat berpuas diri dan tidak lagi berpatokan hanya *product oriented*, tetapi harus *market oriented*. "Artinya, harus bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan pasar saat ini dan akan datang".

D. ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa isu-isu strategis, antara lain:

1. BIDANG PERDAGANGAN

Isu-isu strategis bidang urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya disebabkan karena sampai saat ini belum ada sarana dan prasarana transportasi yang khusus mengangkut logistik dan komoditi hasil pertanian dan perikanan.
2. Belum adanya hasil komoditi asal Selayar yang berkategori ekspor yang dikirim ke Makassar ataupun ke Surabaya disebabkan belum adanya pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) barang, yang merupakan persyaratan untuk dapat memasuki wilayah negara tujuan, dan SKA juga merupakan persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian



bea masuk yang diberikan oleh negara tujuan. SKA diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan SKA atas barang Ekspor di Indonesia.

3. Ditutupnya sementara distribusi logistik peti kemas ke Surabaya dikarenakan belum maksimalnya komoditi perdagangan yang didistribusikan dari Surabaya ke Selayar karena sudah adanya hubungan dagang para pelaku usaha ke distributor Makassar.
4. Belum optimalnya hasil pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lainnya yang menyebabkan para pedagang masih memasok dari daerah lain untuk diperjual belikan di pasar.
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya yang berdampak kepada menurunnya omzet para pedagang serta menurunnya daya beli masyarakat akibat dampak inflasi.
6. Belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengidentifikasi jumlah objek pungutan retribusi atas capaian yang tidak memenuhi target.
7. Adanya beberapa pasar yang dibangun namun sampai saat ini belum difungsikan/dimanfaatkan oleh karena para pedagang lebih menyukai hamparan dibanding los dan kios dalam bangunan gedung pasar yang telah dibangun.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan dan barang penting lainnya yang efektif dan efisien, disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM.



2. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya. padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
3. Volume arus barang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Selayar masih sedikit sehingga belum efektif dan efisien untuk dilakukan pengiriman barang melalui container

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Memaksimalkan produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai komoditi unggulan daerah.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, meminimalisir ketidakpastian, dan memproses pembelian harus mudah dan cepat.

2. BIDANG KOPERASI DAN UKM

Salah satu Tujuan Pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu di berikan prioritas yang tinggi dalam Pembangunan nasional pada umumnya dan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, perlu disusun rencana pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM di kabupaten kepulauan selayar, khususnya baik secara terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan dan ini merupakan acuan bagi stakeholder dalam



melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM secara bersinergi.

Ekonomi rakyat merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam dunia usaha di daerah dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa pandemic yang memporak porandakan perekonomian suatu bangsa . Serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi secara pandemik pertumbuhan ekonomi pasca pandemik. Perekonomian di daerah masih di dominasi oleh sektor dengan produktivitas yang rendah, seperti sektor : pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga. Pada sektor dengan Produktivitas yang rendah inilah jumlah usaha mikro dan kecil terkonsentrasi yang memperebutkan porsi PDB sebesar 34, 4 % pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha mikro dan kecil. Namun usah mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, seperti peryanain tanaman pangan, Perkebunan peternakan, perikanan, perdagangan, dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan,persewahan, jasa Perusahaan,dan kehutanan. Hal ini membuktikan usaha mikro dan kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya saling melengkapi
Jumlah pelaku usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten kepulauan Selayar tahun 2024 sebanyak 19.957 pelaku UMKM dari berbagai sektor.....

Permasalahan strategis nya yaitu :

1. Perlunya penyediaan kebijakan/regulasi pengembangan koperasi dan UMKM,
2. Kurangnya tenaga pendamping KUKM pada tiap kecamatan di masing-masing kabupaten dan kota,
3. Kurangnya anggaran untuk pelatihan koperasi dan UMKM guna mengikuti perkembangan teknologi.



Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengembangan SDM pengurus koperasi,
2. Keterbatasan SDM aparatur pengawas koperasi,

Data / Hal-hal lain yang dianggap perlu juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah :

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan : pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan'
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang ; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.
3. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa : kredit perbankan, pinjaaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya
4. Memfasilitasi kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keaagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

- **Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu **“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**.

“Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” mengandung dua pengertian kondisi, pertama sebagai Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkat/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Yang kedua sebagai Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (HUB) perdagangan barang/jasa, industri dan distribusi logistic yang mencakup Kabupaten/Kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

- **Misi**

Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- ❖ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan transparan.



- ❖ Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan.
- ❖ Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
- ❖ Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.
- ❖ Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
- ❖ Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diatas mengandung arti :

1. Perdagangan adalah meningkatkan daya saing daerah;
2. Koperasi adalah meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi;
Usaha Kecil dan Menengah adalah menumbuhkembangkan UKM/Pedagang Kaki Lima sebagai ujung tombak perekonomian yang berbasis ekonomi dan kerakyatan.
3. Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen adalah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Tujuan dan Sasaran**

Dengan berlandaskan misi yang telah di tetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten, Kepulauan Selayar untuk masa tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi Daerah
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
3. Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan potensi kemaritiman
5. Meningkatkan Aktualisasi nilai budaya
6. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup

Sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya daya beli masyarakat
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan
5. Terbangun dan berkembangnya Kawasan distribusi logistic (barang dan jasa)
6. Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan

Tabel 2.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

| No | Visi | Misi | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target Th. 2024 |
|----|---|--|---|---|---|-----------------|
| 1 | Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritime Kawasan Timur Indonesia | Mengembangkan Tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan tranparan | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Indeks Reformasi birokrasi perangkat daerah | 74 (B) |
| | | | | | Nilai SAKIP perangkat daerah | 75 (BB) |
| | | | | | Laporan Keuangan OPD sesuai Standar | Sesuai |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------|
| | | | | Akuntansi Pemerintahan | |
| | | | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | 84 (B) |
| | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Meningkatkan kemandirian pelaku usaha | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | Cakupan kemandirian pelaku usaha | 13,98 |
| | | | | Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri | 22,46 |
| | | | | Persentase Kemandirian UMK | 5,50 |
| | Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman | Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri | Meningkatnya potensi ketersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan | Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 7,94 |

- Perwujudan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab.
- Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran.
3. Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah.
4. Peningkatan kualitas manajemen asset daerah.
5. Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah.
6. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system.
7. Perbaikan dan penerapan system dan prosedur pelayanan public.
8. Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin.
9. Perbaikan income perkapita.
10. Pengendalian harga.
11. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita.
12. Pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah.
13. Peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata.
14. Peningkatan sadar wisata.
15. Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama pendukung kegiatan distribusi logistik pada Kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara pulau selayar).
16. Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 diadakan perubahan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. yang semula 6 urusan yakni, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Kemetrolgian, Urusan, Koperasi dan Urusan Usaha Kecil Menengah menjadi 2 urusan yakni Urusan Perdagangan dan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

| | |
|-----------------|---|
| Nama Organisasi | : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar |
| Tugas | : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah2. Pengendalian Kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. |

| No | Indikator Kinerja Utama | Target | | | | |
|--|--|--------|--------|---------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Urusan Bidang Perdagangan | | | | | | |
| I | Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan | | | | | |
| | a. Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar | 56,25 | 62,5 | 68,75 | 75 | 81,25 |
| | b. Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan | 18 | 18,1 | 18 | 18 | 18 |
| | c. Kecukupan Komoditas Perdagangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| II. | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | | | | | |
| | a. Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri | 18,84 | 21,01 | 22,46.. | 23,91 | 25,36 |
| | b. Persentase Kemandirian UMK | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 |
| III. | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | | | | | |
| | a. Nilai SAKIP perangkat daerah | 65 (B) | 70 (B) | 74(B) | 78(B) | 82 |
| | b. Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |

KEPALA DINAS



FANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses mulai dari persiapan perencanaan kinerja, pelaksanaan koordinasi antara bidang-bidang di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, telaah dan evaluasi, sampai dengan penetapan anggaran yang diwujudkan didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tabel 2.3.1
Rencana Kerja Tahun 2024

| Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2024 | | |
|---|--|------------------------------|-----------|-------------------------|
| | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Layanan internal | Kab. Kep. Selayar | BB | 5.189.923.872 |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun | Kab. Kep. Selayar | 100% | 156.000.000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT) | Kab. Kep. Selayar | 3 Dokumen | 35,000,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Kab. Kep. Selayar | 1 Dokumen | 15.000,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) | Kab. Kep. Selayar | 1 Dokumen | 15.000,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA) | Kab. Kep. Selayar | 1 Dokumen | 10,000,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) | Kab. Kep. Selayar | 1 Dokumen | 10,000,000 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|------------|---------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPPD, Buku Profil) | Kab. Kep. Selayar | 4 Dokumen | 30,000,000 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK) | Kab. Kep. Selayar | 13 Dokumen | 41,000,000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kab. Kep. Selayar | 100% | 3,153,709,507 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan | Kab. Kep. Selayar | 39 Orang | 3,118,409,507 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | Kab. Kep. Selayar | 1 Laporan | 15,300,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 12 laporan | 11,000,000 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | Kab. Kep. Selayar | 12 laporan | 9,000,000 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun | Kab. Kep. Selayar | 100% | 11,000,000 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Kab. Kep. Selayar | | - |



| | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | Kab. Kep. Selayar | - | - |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 4 laporan | 11,000,000 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset (BI, KIR, KIB, CIL) | Kab. Kep. Selayar | - | - |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan daerah yang tersusun | Kab. Kep. Selayar | 100% | 102,500,000 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | Kab. Kep. Selayar | - | - |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (DUK, KGB, KP, KP4) yang tersusun | Kab. Kep. Selayar | 4 Dokumen | 15,000,000 |
| Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah dokumen evaluasi kinerja ASN (SKP, DP3) yang tersusun | Kab. Kep. Selayar | 2 Dokumen | 10,000,000 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Kab. Kep. Selayar | 4 ASN | 50,000,000 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implemetasi peraturan perundang undangan | Kab. Kep. Selayar | 2 ASN | 27,500,000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kelancaran Adminstras dan Operasional Perkantoran | Kab. Kep. Selayar | 100% | 668,500,000 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Kab. Kep. Selayar | 70 Buah | 200,000,000 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan (spanduk) yang tersedia | Kab. Kep. Selayar | 87 Buah | 70,000,000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Klipping Bahan bacaan Koran dan Buku Produk Hukum terkait perindag KUKM yang tersedia | Kab. Kep. Selayar | 3 Buah | 8,000,000 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 500 orang | 25.000,000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Perindag KUKM yang tersusun | Kab. Kep. Selayar | 272 Laporan | 365,500,000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | Kab. Kep. Selayar | 100% | 434,000,000 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah motor dinas yang diadakan | Kab. Kep. Selayar | 2 Unit | 40,000,000 |
| Pengadaan Mebel | Jumlah mebeleur yang disediakan | Kab. Kep. Selayar | 7 Unit | 145,000,000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan yang disediakan | Kab. Kep. Selayar | 7 Unit | 105,000,000 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | Kab. Kep. Selayar | 2 Unit | 118,000,000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | Kab. Kep. Selayar | 1 Unit | 26,000,000 |



| | | | | |
|--|---|-------------------|----------|-------------|
| Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran | Kab. Kep. Selayar | 100 | 528,600,000 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat dinas yang terkirim | Kab. Kep. Selayar | 100 Buah | 7,500,000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 3 Buah | 86,100,000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 52 Orang | 435,000,000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah | Kab. Kep. Selayar | 100% | 135,614.365 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | Kab. Kep. Selayar | 1 Unit | 64,800,000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | Kab. Kep. Selayar | 10 Unit | 20,514,000 |
| Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | Kab. Kep. Selayar | | - |



| | | | | |
|--|--|------------------------------|------------|--------------------|
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Kab. Kep. Selayar | 2 Unit | 50,300,365 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN | | | | |
| Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan | Kab. Kep. Selayar | 100 | 103,906,266 |
| Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Jumlah rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan | Kab. Kep. Selayar | 200 | 103,906,266 |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | Kab. Kep. Selayar | 70 | 103,906,266 |
| Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) | | Kab. Kep. Selayar | | - |



| | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|
| untuk Penerima Waralaba dari Waralaba dalam Negeri | | | | |
| Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan waralaba (STPW) dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam Negeri | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2 | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | Kab. Kep. Selayar | | - |



| | | | | |
|--|---|------------------------------|------------|--------------------|
| Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | Kab. Kep. Selayar | | - |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan | Kab. Kep. Selayar | 100 | 155,859,399 |
| Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan (Dokumen) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 93,559,399 |
| Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan (Dokumen) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 40,059,399 |
| Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan (Dokumen) | Kab. Kep. Selayar | 2 | 51,000,000 |
| Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan (Dokumen) | Kab. Kep. Selayar | 30 | 62,300,000 |
| Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana | | 1 | 35,300,000 |



| | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------|--------------------|
| | Distribusi Perdagangan (Dokumen) | | | |
| Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 27,000,000 |
| Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting | Persentase jenis komoditi yang dipantau (%) | Kab. Kep. Selayar | 100% | 467,578,197 |
| Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah kabupaten/Kota | Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau | Kab. Kep. Selayar | 11 Kecamatan | 154,950,000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 51,500,000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 11 Kecamatan | 51,500,000 |
| Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 51,950,000 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|
| Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan | Kab. Kep. Selayar | 1 Kabupaten | 275,278,197 |
| Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 120,828,197 |
| Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegritas dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 103,350,000 |
| Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 51,200,500 |
| Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 4 | 37,350,000 |
| Pemeriksaan kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen) | Kab. Kep. Selayar | 7 | 16,500,000 |
| Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 10,350,000 |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|------------|--------------------|
| Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 10,500,000 |
| Program Pengembangan Ekspor | Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor | Kab. Kep. Selayar | 100 | 187,031,279 |
| Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan | Kab. Kep. Selayar | 15 | 187,031,279 |
| Pameran dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | Kab. Kep. Selayar | 2 | 45,200,000 |
| Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) | Kab. Kep. Selayar | 2 | 35,850,000 |
| Misi Dagang Bagi Ekpor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) | Kab. Kep. Selayar | 2 | 66,181,279 |
| Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk) | Kab. Kep. Selayar | 6 | 25,850,000 |
| Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (2) | Persentase alat ukur yang ditera | Kab. Kep. Selayar | 100 | 436,406,317 |
| Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Alat UTTP bertanda tera SAH yang berlaku | Kab. Kep. Selayar | 650 | 436,406,317 |
| Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat | Kab. Kep. Selayar | 650 | 166,406,317 |



| | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|--------------------|
| | Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | | | |
| Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) | Kab. Kep. Selayar | 231 | 206,000,000 |
| Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit) | Kab. Kep. Selayar | 1500 | 64,000,000 |
| Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri | Persentase produk lokal yang dipasarkan | Kab. Kep. Selayar | 37 | 103,906,266 |
| Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri | Jumlah prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri | Kab. Kep. Selayar | 5 | 103,906,266 |
| Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 100 | 16,906,266 |
| Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Kep. Selayar | 100 | 16,000,000 |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Kab. Kep. Selayar | 1 | 71,000,000 |
| URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | |
| Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam | Kab. Kep. Selayar | 100 | 10,250,300 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|--------------------|
| Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha | Kab. Kep. Selayar | 2 | 5,125,150 |
| Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pemabukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 5,125,150 |
| Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan Izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas. | Kab. Kep. Selayar | 1 | 5,125,150 |
| Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabuapten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | Kab. Kep. Selayar | 1 | 5,125,150 |
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi sehat | Kab. Kep. Selayar | 100 | 124,687,519 |
| Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah | Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang diperiksa dan diawasi | Kab. Kep. Selayar | 3 | 124,687,519 |



| | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|--------------------|
| Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Penguatan Koperasi Tatayang Dilakukan Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) | Kab. Kep. Selayar | 162 | 72,687,519 |
| Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah unit Usaha Koperasi yang telahdilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | Kab. Kep. Selayar | 30 | 52,000,000 |
| Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat | Kab. Kep. Selayar | 100 | 129,882,833 |
| Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Sehat organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi | Kab. Kep. Selayar | 10 Koperasi | 129,882,833 |
| Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang Akuntabel | Kab. Kep. Selayar | 2 Koperasi | 37,000,000 |
| Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang Diberikan penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | Kab. Kep. Selayar | 30 Koperasi | 92,882,833 |
| Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan | Kab. Kep. Selayar | 100 | 176,640,652 |
| Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Kab. Kep. Selayar | 60 Koperasi | 176,640,652 |



| | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|--------------------|
| Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | Kab. Kep. Selayar | 100 Orang | 176,640,652 |
| Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan(%) | Kab. Kep. Selayar | 100 | 192,226,592 |
| Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Sehat | Kab. Kep. Selayar | 6 Koperasi | 192,226,592 |
| Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Naik Kelas | Kab. Kep. Selayar | 6 Koperasi | 192,226,592 |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | Kab. Kep. Selayar | 100 | 613,187,296 |
| Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UMKM yang naik kelas | Kab. Kep. Selayar | 30 UMKM | 613,187,296 |
| Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | Kab. Kep. Selayar | 30 UMKM | 152,000,000 |
| Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan | Kab. Kep. Selayar | 3 Sentra | 125,000,000 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------|--------------------|
| Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | Kab. Kep. Selayar | 200 Unit Usaha | 83,000,000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | Kab. Kep. Selayar | 150 Orang | 152,000,000 |
| Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | Kab. Kep. Selayar | 30 | 44,000,000 |
| Program Pengembangan UMKM | Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya | Kab. Kep. Selayar | 100 | 493,554,764 |
| Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT) | Kab. Kep. Selayar | 30 | 493,554,764 |
| Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produk dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi | Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan teknologi | Kab. Kep. Selayar | 30 unit Usaha | 493,554,764 |

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya manusia yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target Th. 2023 |
|----|---|---|-----------------|
| 1 | Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Indeks Reformasi birokrasi perangkat daerah | 74 (B) |
| | | Nilai SAKIP perangkat daerah | 75 (BB) |



| | | | |
|---|--|--|--------|
| | | Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | sesuai |
| | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | 84 (B) |
| 2 | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | Cakupan kemandirian pelaku usaha | 13,98 |
| | | Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri | 22,46 |
| | | Persentase Kemandirian UMK | 5,50 |
| 3 | Meningkatnya potensi ketersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan | Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 7,91 |
| | | Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar | 75 |
| | | Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan | 18 |
| | | Kecukupan Komoditas Perdagangan | 100 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Selayar berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menangani 2 urusan, 1 Urusan wajib yakni Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 1 urusan pilihan yakni Urusan Perdagangan.

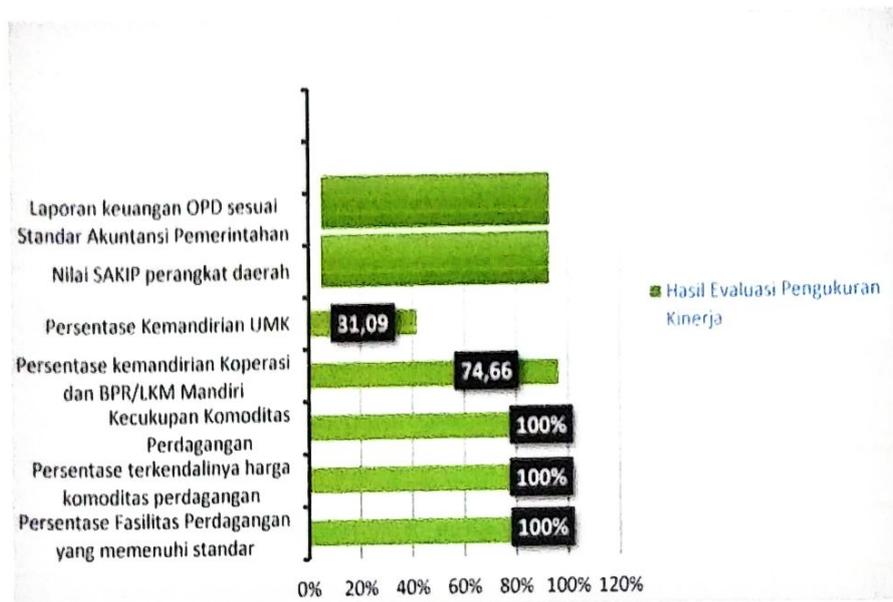
Menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan, Meningkatnya Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrologian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar, Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi, dan Meningkatnya Kualitas UMKM . Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dibutuhkan 7 Indikator Kinerja. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 menunjukkan indikator telah dicapai dengan hasil yang "baik".



A. PENGUKURAN KINERJA

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun dokumen pengukuran kinerja triwulan dan tahunan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Hasil terhadap pengukuran kinerja



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan



penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

1. Target dan Realisasi Kinerja

Dari Indikator-indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan rata-rata capaian realisasi di rinci pada table berikut :

Tabel 3.2.1
Target dan Realisasi Kinerja

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan |
|--|--|--------|--------|-----------|---------|------------|
| Urusan Bidang Perdagangan | | | | | | |
| I | Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan | | | | | |
| | a. Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar | % | 68,75 | 68,96 | 100 | |
| | b. Persentase terkendalnya harga komoditas perdagangan | % | 18 | 18 | 100 | |
| | c. Kecukupan Komoditas Perdagangan | % | 100 | 100 | 100 | |
| Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| II. | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | | | | | |
| | a. Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri | % | 22,46 | 16,77 | 74,66 | |
| | b. Persentase Kemandirian UMK | % | 5,50 | 1,71 | 31,09 | |



| | | | | | | |
|------|---|--------|--------|--------|--|-----------------|
| III. | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | | | | | |
| | a. Nilai SAKP perangkat daerah | Nilai | 70 | | | Belum Di Review |
| | b. Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | Sesuai | Sesuai | Sesuai | | |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu, dapat dilihat berdasarkan IKU Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2.
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

| No | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2023 | | | | Tahun 2024 | | |
|----------------------------------|---|------------|--------|-----------|---------|------------|--------|-----------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Satuan | Target | Realisasi |
| Urusan Bidang Perdagangan | | | | | | | | |
| I | Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan | | | | | | | |
| | a. Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar | % | 62,5 | 59,38 | 95 | 68,75 | 68,96 | 100 |
| | b. Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan | % | 18,1 | 18,1 | 100 | 18 | 100 | 100 |



| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|-------|--|-------|-------|-------|
| | c. Kecukupan Komoditas Perdagangan | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | |
| II. | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | | | | | | | | |
| | a. Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri | % | 21,01 | 20,29 | 96,57 | | 22,46 | 16,77 | 74,66 |
| | b. Persentase Kemandirian UMK | % | 4,50 | 1,88 | 41,78 | | 5,50 | 1,71 | 31,09 |
| III. | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | | | | | | | | |
| | a. Nilai SAKIP perangkat daerah | Nilai | B | C | | | | | |
| | b. Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | - | Sesuai | Sesuai | | | | | |

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian indikator tersebut melalui 7 indikator sampai tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

3.1. Persentase Fasilitasi Perdagangan yang memenuhi standar

Fasilitasi Perdagangan yang memenuhi standar didukung dengan program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan output fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, peningkatan



distribusi barang/jasa dan memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha dan pihak buyer.

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat) di seluruh kecamatan dengan memastikan seluruh sarana perdagangan yang telah dibangun telah dipergunakan serta memantau fasilitas yang ada agar memenuhi standar.



3.2. Persentase Terkendalinya Harga Komoditas Perdagangan

Pengendalian harga komoditas perdagangan di dukung oleh Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting dengan kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten dengan realisasi capaian kinerja 100% Sehingga sepanjang tahun 2024 harga bahan pokok dan barang penting lainnya relatif stabil.



3.3. Kecukupan Komoditas Perdagangan.

Kecukupan Komoditas Perdagangan didukung oleh Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting dengan kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100% dimana pada tahun 2024 tidak terdapat kelangkaan komoditas perdagangan terutama bahan pokok dan barang penting lainnya.



3.4. Persentase Kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri.

Kemandirian koperasi dan BPR/LKM Mandiri didukung oleh tiga program yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 74,66%.

Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri di dukung dengan satu kegiatan :

1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dengan output 71 orang pengurus koperasi.

Tabel 3.2.4

Jumlah koperasi dan BPR tahun 2019-2024

| NO | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah koperasi aktif | 162 | 136 | 136 | 137 | 148 | 148 |
| 2 | Jumlah koperasi | 132 | 165 | 165 | 167 | 177 | 177 |
| 3 | Jumlah BPR/LKM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jumlah BPR Aktif/LKM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.5. Persentase Kemandirian UMK

Kemandirian UMK didukung oleh dua yaitu program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program pengembangan UMKM dengan realisasi capaian kinerja sebesar 31,09%.

Persentase kemandirian UMK di dukung dengan tiga kegiatan :

1. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan output 160 orang pelaku usaha.
2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan output 87 wirausaha baru.
3. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi dengan output 85 pelaku usaha.

Total Keseluruhan Jumlah Penerima Bantuan dari Tahun 2019-2024 Sebanyak 500 Kelompok, dengan Jumlah Unit Sebanyak 2.813 Unit Bantuan Peralatan.

Tabel 3.2.5

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2024 Sebesar Rp 10.000.000 terdiri dari :

| No. | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
|-----|--------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Mesin Parut Kelapa | 1 | 1 Unit |
| 2 | Mesin Parut Kelapa | 1 | 1 Unit |

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2023 Sebesar Rp 585.000.000 terdiri dari :

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
|----|---|-----------------|-------------|
| 1 | Pengadaan Perlengkapan/Aksesoris Rias Pengantin | 1 | 130 |
| 2 | Pengadaan Rental Komputer | 1 | 4 |



| | | | |
|---------------|--|----------|------------|
| 3 | Pengadaan Pertukangan | 3 | 18 |
| 4 | Pengadaan Perbengkelan | 1 | 10 |
| 5 | Pengadaan Air Kemasan 2 Layer | 1 | 1 |
| 6 | Pengadaan Mesin-Mesin Parut Kelapa komplit | 2 | 2 |
| Jumlah | | 9 | 167 |

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2022 Sebesar Rp. 2.245.196.000,- terdiri dari :

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Pengadaan Depot Air Minum | 2 | 2 |
| 2 | Pengadaan AMDK | 1 | 1 |
| 3 | Pengadaan Masak-memasak | 11 | 55 |
| 4 | Mesin Jahit | 6 | 35 |
| 5 | Parut Kelapan | 7 | 36 |
| 6 | Ada Pertukangan | 10 | 70 |
| 7 | Perbengkelam | 8 | 73 Unit |
| Jumlah | | 45 Kelompok | 132 Unit |



Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2021 Sebesar Rp. 2.243.186.000,-
terdiri dari:

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
|----|--|-----------------|-------------|
| 1 | Pengadaan Alat Depot Air Minum | 2 | 2 unit |
| 2 | Pengadaan Mesin Mixer Pembuat Roti | 3 | 20 Unit |
| 3 | Pengadaan Mesin Jahit | 3 | 12 Unit |
| 4 | Pengadaan Mesin Obras | 3 | 9 Unit |
| 5 | Pengadaan Mesin penggiling tepung ikan | 1 | 1 Unit |
| 6 | Pengadaan Pertukangan | 14 | 92 unit |
| 7 | Pengadaan Mesin Sentrifugal | 4 | 4 Unit |
| 8 | Pengadaan Mesin penggiling Mie | 9 | 27 Unit |
| 9 | Pengadaan Mesin Pemeras kelapa | 9 | 9 Unit |
| 10 | Pengadaan mesin gula Merah | 4 | 4 Unit |
| | Jumlah | 52 | 180 Unit |

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2019 Sebesar Rp. 1.258.575.000,-
terdiri dari ini:

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
|----|--|-----------------|-------------|
| 1 | Pengadaan Alat Perajang Keripik | 15 Kelompok | 105 Unit |
| 2 | Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras | 12 Kelompok | 60 Unit |
| 3 | Pengadaan Mesin Pencetak Batu Merah | 5 Kelompok | 5 Unit |
| 4 | Pengadaan Alat Pertukangan | 17 Kelompok | 119 Unit |
| 5 | Pengadaan Alat Masak Memasak | 25 Kelompok | 550 Unit |
| 6 | Pengadaan Pengupas Sabut Kelapa | 5 Kelompok | 5 Unit |
| 7 | Pengadaan Mesin Parut Kelapa Dan Penepung Beras | 11 Kelompok | 55 Unit |
| 8 | Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Dan Mesin Press Sampah | 1 Kelompok | 2 Unit |
| | Jumlah | 91 Kelompok | 901 Unit |

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.997.459.250,-
terdiri dari :

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
|----|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Pengadaan Parut Kelapa | 22 Kelompok | 67 Unit |
| 2 | Pengadaan Alat Pengelolaan Ikan | 20 Kelompok | 60 Unit |
| 3 | Pengadaan Alat Pertukangan | 22 Kelompok | 22 Unit |
| 4 | Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras | 37 Kelompok | 40 Unit |
| 5 | Pengadaan Oven Kue | 20 Kelompok | 20 Unit |
| 6 | Pengadaan Alat Vacuum Pres | 32 Kelompok | 94 Unit |
| 7 | Pengadaan Alat Pemecah Kulit Kemiri | 11 Kelompok | 11 Unit |
| 8 | Pengadaan Mesin Pengering | 12 Kelompok | 12 Unit |
| 9 | Pengadaan Mesin Press Emping | 16 Kelompok | 16 Unit |
| 10 | Pengadaan Alat Kerajinan | 17 Kelompok | 272 Unit |
| | Jumlah | 209 Kelompok | 614 Unit |

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2017 Sebesar Rp. 1.506.772.250,-
terdiri dari :

| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Kelompok | Jumlah Unit |
|----|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Pengadaan Peralatan Masak Memasak | 23 Kelompok | 427 Unit |
| 2 | Pengadaan Mesin Spinner | 22 Kelompok | 73 Unit |
| 3 | Pengadaan Mesin Penggiling Daging | 15 Kelompok | 30 Unit |
| 4 | Pengadaan Mesin Pembuat Roti | 22 Kelompok | 20 Unit |
| 5 | Pengadaan Alat Kacip | 21 Kelompok | 96 Unit |
| | Jumlah | 103 Kelompok | 217 Unit |



3.6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pada Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 diperoleh nilai sebesar (belum direviu)

3.7. Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Daerah

Laporan keuangan OPD yang meliputi teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan -LO, beban, pendapatan-LRA, belanja asset, kewajiban, ekuitas penyesuaian dan koreksi serta penyusunan Laporan keuangan OPD telah sesuai dengan standar akuntansi daerah.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi dan realisasi anggaran, rasio ekonomi, capaian kinerja keluaran dan rasio efisiensi dari masing-masing Urusan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai pada tabel dibawah ini:

| No | Indikator Kinerja Utama | Anggaran | Realisasi | Rasio Ekonomi % | Capaian Kinerja % | Keterangan |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| Urusan Bidang Perdagangan | | | | | | |
| I | Meningkatnya potensi keersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan | | | | | |
| | a. Persentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar | 52.058.200 | 52.058.200 | - | 100 | |
| | b. Persentase terkendalnya harga komoditas perdagangan | 1.700.011.800 | 1.696.861.900 | 99,81 | 100 | |
| | c. Kecukupan Komoditas Perdagangan | 180.710.200 | 179.9131.100 | 99,56 | 100 | |

| Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-----|--------|-----------------|
| II. | Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha | | | | | |
| | a. Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri | 385.000.000 | 385.000.000 | 100 | 74,66 | |
| | b. Persentase Kemandirian UMK | 1.411.800.000 | 1.411.795.000 | 100 | 31,09 | |
| III. | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah | | | | | |
| | a. Nilai SAKIP perangkat daerah | 5.279.500 | 4.600.000 | 100 | - | Belum Di Review |
| | b. Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | 9.415.450 | 9.300.000 | 100 | Sesuai | |

C. REALISASI KEUANGAN

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 melaksanakan 9 (Sembilan) Program dengan 9 (Sembilan) Kegiatan Penunjang, 8 (Delapan) kegiatan Bidang Perdagangan dan 5 (Lima) kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Rata-rata capaian kinerja program kegiatan mencapai 100% dengan realisasi keuangan 98.08 % atau Rp.9.398.303.443 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Tabel 3.3.1

Realisasi Keuangan Tahun 2024

| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/SubKegiatan | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------|---|
| | | Pagu | Realisasi | % |



| | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Layanan internal | Rp. 4.651.225.321 | Rp. 4.498.526.793 | 96,72% |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun | Rp. 21.492.200 | Rp. 20.397.900 | 94,91% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT) | Rp. 2.585.200 | Rp. 2.583.000 | 99,91 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Rp.1.371.500 | Rp. 1.046.500 | 76,30 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) | Rp. 2.647.400 | Rp.2.647.400 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | Rp. 2.482.500 | Rp. 2.482.500 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) | Rp. 2.738.500 | Rp.2.738.500 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPPD, Buku Profil) | Rp. 4.387.600 | Rp. 4.300.000 | 98,00 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK) | Rp. 5.279.500 | Rp. 4.600.000 | 87,13 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 2.782.447.050 | Rp. 2.723.187.371 | 98% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan | Rp. 2.755.114.700 | Rp. 2.700.004.771 | 98,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | Rp. 9.415.450 | Rp. 9.300.000 | 98,77 |



| | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | Rp. 9.999.200 | Rp. 7.382.600 | 73,83 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | Rp. 6.917.700 | Rp. 6.500.000 | 93,96 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.200.000 | 95,45% |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.200.000 | 95,45 |
| Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan daerah yang tersusun | Rp. 175.000.000 | Rp. 117.959.200 | 67,41% |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | Rp. 75.000.000 | Rp. 43.524.600 | 58,03 |
| Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | Rp. 85.000.000 | Rp. 69.434.600 | 81,69 |
| Pengolahan Data Retribusi Daerah | | Rp. 15.000.000 | Rp. 5.000.000 | 33,33 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Rp.16.400.000 | Rp. 16.301.500 | 99,40% |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (DUK,KGB, KP, KP4) yang tersusun | Rp. 9.500.000 | Rp. 9.458.400 | 99,56 |



| | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------|
| Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah dokumen evaluasi kinerja ASN (SKP, DP3) yang tersusun | Rp. 6.900.000 | Rp. 6.843.100 | 99,18 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implemetasi peraturan perundang undangan | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kelancaran Administras dan Operasional Perkantoran | Rp.636.044.300 | Rp. 635.556.300 | 99,92% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Rp. 97.105.900 | Rp. 96.790.300 | 99,67 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan (spanduk) yang tersedia | Rp. 67.058.400 | Rp. 67.057.000 | 100 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | Rp. 17.442.000 | Rp. 17.270.000 | 99,01 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Perindag KUKM yang tersusun | Rp. 454.439.000 | Rp. 454.439.000 | 100 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | Rp. 236.026.171 | Rp. 207.175.020 | 87,78% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan yang disediakan | Rp. 17.345.000 | Rp. 17.345.000 | 100% |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit) | Rp. 218.681.171 | Rp. 153.247.000 | 70,08 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran | Rp.600.825600 | Rp. 599.834.502 | 99,84% |



| | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------|
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat dinas yang terkirim | Rp. 7.500.000 | Rp. 7.304.900 | 97,40 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | Rp. 435.360.000 | Rp. 435.000.000 | 100 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah | Rp. 179.590.000 | Rp. 173.915.000 | 96,84 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | Rp. 111.650.000 | Rp. 106.450.000 | 95,34 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | Rp. 28.990.000 | Rp. 28.515.000 | 98,36 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Rp. 108.300.000 | Rp. 108.300.000 | 100 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Rp. 38.950.000 | Rp. 38.950.000 | |
| URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN | | | | |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan | 52,058,200 | 52,058,200 | 100 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 52,058,200 | 52,058,200 | 100 |
| Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 52,058,200 | 52,058,200 | 100 |
| Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok barang Penting | Persentase jenis komoditi yang dipantau (%) | Rp. 1.935.516.700 | Rp. 1.900.423.800 | 98,19 |
| Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah kabupaten/Kota | Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau | Rp. 54.794.700 | Rp. 23.648.800 | 43,16 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | Rp. 54.794.700 | Rp. 23.648.800 | 43,16 |
| Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan | Rp. 1.880.722.000 | Rp. 1.876.775.000 | 99,79 |
| Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | Rp. 180.710.200 | Rp. 179.913.100 | 99,56 |

| | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------|
| Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | Rp. 1.700.011.800 | Rp. 1.696.861.900 | 99,81 |
| Program Pengembangan Ekspor | Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor | Rp. 131.752.900 | Rp. 131.647.000 | 99,92 |
| Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan | Rp. 131.752.900 | Rp. 131.647.000 | 99,92x |
| Misi Dagang Bagi Ekpor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) | Rp. 131.752.900 | Rp. 131.647.000 | 99,92 |
| Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (2) | Persentase alat ukur yang ditera | 74.678.000 | 74.290.500 | 99,48 |
| Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Alat UTTP bertanda tera SAH yang berlaku | 74.678.000 | 74.290.500 | 99,48 |
| Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 74.678.000 | 74.290.500 | 99,48 |
| Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri | Persentase produk lokal yang dipasarkan | 0 | 0 | 0 |
| Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri | Jumlah prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri | 0 | 0 | 0 |



| URUNAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|------------|
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi sehat | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 |
| Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang diperiksa dan diawasi | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 |
| Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 |
| Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan(%) | 360.000.000 | 360.000.000 | 100 |
| Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Sehat | 360.000.000 | 360.000.000 | 100 |
| Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Naik Kelas | 360.000.000 | 360.000.000 | 100 |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang Diberdayakan | Rp. 1.411.800.000 | Rp. 1.411.795.000 | 100 |



| | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | 100 |
| Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | Rp. 1.295.000.000 | Rp. 1.295.000.000 | 100 |
| Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | Rp. 91.800.000 | Rp. 91.800.000 | 100 |
| Program Pengembangan UMKM | Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya | Rp. 940.000.000 | Rp. 939.935.950 | 99,99% |
| Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT) | Rp. 940.000.000 | Rp. 939.935.950 | 99,99% |
| Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produk dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi | Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain dan teknologi | Rp. 940.000.000 | Rp. 939.935.950 | 99,99% |

Secara umum anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari tiga sumber yaitu APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kontribusi pendapatan dibidang Perdagangan melalui retribusi pasar dan layanan tera/tera ulang.



1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.3.2

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

| No | Sumber | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Reribusi Pelayanan Pasar | 500.000.000 | 354.003.700 | 70,80 |
| 2. | Layanan Tera/Tera Ulang | - | - | - |
| | Jumlah | 500.000.000 | 354.003.700 | 70,80 |

2. Belanja

Tabel 3.3.3

Rekapitulasi Belanja Tahun 2024

| Uraian Belanja | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sisa (Rp.) | % |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Belanja Operasi | 9.364.029.950 | 9.245.056.443 | 118.973.507 | 98,7 |
| Belanja Modal | 218.001.171 | 153.247.000 | 64.754.171 | 70,29 |
| Surplus/(defisit) | 9.582.031.121 | 9.398.303.443 | 183.727.678 | 99,08 |

BAB IV

PENUTUP

Dari hal-hal yang telah terurai melalui bab-bab diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan program dapat dicapai dengan baik walaupun masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya dengan keterbatasan waktu, keterlambatan dalam pencairan keuangan serta untuk pembinaan diwilayah kepulauan terhambat masalah cuaca yang kurang mendukung. Pemecahan dari permasalahan dan kendala perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang agar pelaksanaan dapat lebih baik dari segi waktu, realisasi dan capaian kinerja yang akuntabel.

Selanjutnya masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan laporan ini dapat tercapai dengan lebih baik dan untuk menjadi perbaikan dimasa yang akan datang semoga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab dapat dicapai.

LAMPIRAN

- **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

